DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA TW IV

Tahun 2024

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
HASIL RENJA PD
TRIWULAN IV TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, bimbingan dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan IV Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi hasil rencana kerja perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ini merupakan laporan evaluasi hasil renja 2024 per triwulanan yang disusun untuk mengevaluasi hasil renja perangkat daerah baik berupa capaian kinerja dan keuangan dan merupakan capaian kinerja yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, capaian kinerja tersebut merupakan tolak ukur yang berkaitan erat dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan Renstra Perangkat Daerah. Evaluasi perumusan kebijakan sehingga Renja Perangkat Daerah secara lengkap memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, target kinerja dan pagu indikatif.

Dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja perangkat daerah ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisan, penyajian dan substansi materinya, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Demikian laporan hasil pengendalian dan evaluasi disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Bumi Serumpun Sebalai.

Pangkalpinang, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

DARLAN S.Pd.,M.M
Pembina Utama Madya
NIP.19691206 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		2
BAB I	PENDAHULUAN	3
	1.1. Latar Belakang	3
	1.2. Maksud dan Tujuan	3
	1.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	4
	1.4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	4
BAB II	EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA	7
	2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah Terhadap Program/Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah	7
	2.2. Laporan Kemajuan Kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024	8
BAB III	KENDALA DAN TINDAK LANJUT	25
	3.1. Kendala	25
	3.2. Tindak Lanjut	25
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Untuk menjamin bahwa Renja Perangkat Daerah telah menjabarkan Renstra Perangkat Daerah dengan baik, maka perlu dilakukan Evaluasi hasil renja. Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan berupa anggaran kas (angkas) yang dibagi setiap triwulan.

Evaluasi hasil renja Perangkat Daerah baik berupa kinerja dan keuangan merupakan capaian kinerja yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, capaian kinerja tersebut merupakan tolak ukur yang berkaitan erat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Renja OPD tahun berikutnya. Sistem kepemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh, untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud kepemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja ini dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan pengendalian dan evaluasi hasil renja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Sinkronisasi pengeluaran keuangan antara aliran kas perangkat daerah per triwulan dengan realisasi anggaran per triwulan.
b. Mengetahui capaian kinerja dan keuangan per triwulan;
c. Menemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi anggaran per triwulan berdasarkan target pengeluaran yang ada di aliran kas perangkat daerah.

Tujuan Laporan pengendalian dan evaluasi hasil renja perangkat daerah adalah tercapainya pengendalian dan evaluasi hasil renja perangkat daerah dan kesesuaian antara target dengan capaian kinerja dan keuangan sehingga akuntabilitas kinerja perangkat daerah semakin maksimal.

1.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam Anggaran Perubahan 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan tujuan yaitu meningkatnya investasi dengan sasaran yaitu meningkatnya realisasi investasi.

1.4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam Mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan strategi beserta program, kegiatan dan sub kegiatan. Pada anggaran perubahan 2024 terdiri dari 5 Program, 16 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

   Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas DPMPTSP melalui pelayanan kesekretariatan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan dengan sub kegiatan:
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
   - Penyediaan Bahan/Material;
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan;
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

   a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan yaitu
      - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dengan sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi;

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Yaitu :

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
- Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

b. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

dengan sub kegiatan yaitu;

- Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
- Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

dengan sub kegiatan yaitu :

- Pengawasan Penanaman Modal;
- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya;
- Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha;

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan :

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Selain hal tersebut diatas, DPMPTSP juga memiliki UPT PPT wilayah Belitung dengan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan :
   a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
   c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

Dalam APBD Tahun 2024 pagu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebesar Rp.13.554.136.615,00 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp.8.316.248.119,00 dan Belanja Barang jasa sebesar Rp.4.223.174.596,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.1.014.713.900,00 sehingga total pagu sebesar Rp.13.554.136.615,00. Dalam APBD Perubahan 2024 terdapat pegurangan anggaran sebesar Rp1.383.437.012,00,- sehingga total pagu setelah perubahan 2024 sebesar Rp12.170.699.603,00.- atau turun sebesar 10,21%. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, realisasi Belanja sebesar Rp.11.530.479.535,- atau sebesar 94,74%.

Dalam Tahun 2024 DPMPTSP mempunyai target dari penerbitan perizinan dan non perizinan adalah sebesar 925 izin dan non perizinan. Dalam APBD Perubahan 2024 terdapat pengurangan target dari penerbitan perizinan dan non perizinan adalah sebesar 475 izin dan non perizinan sehingga izin dan non perizinan yang terbit tahun 2024 sebanyak 847 izin dan non perizinan. Untuk izin yang telah dikeluarin adalah sebanyak 847 izin dan non perizinan atau 178,31% dari target.

Sesuai tujuan DPMPTSP adalah meningkatkan investasi, sampai TW III tercatat investasi yang dirilis oleh LKPM adalah sebesar Rp.12.379.089.400.000,- atau 134,55% dari target APBD sebesar Rp.9.200.000.000.000,-. Sementara bila dibandingkan dengan target nasional capaian nilai investasi tersebut sebesar 48,35% dari target nasional sebesar Rp.25.600.000.000.000

2.1. Perbandingan antara Program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah terhadap Program/Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah .

Tabel 2.1.
Perbandingan Program Kegiatan Dalam Renstra dan Renja DPMPTSP

No	Program/Kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah TA. 2024	No	Program/Kegiatan di dalam RenstraPerangkat Daerah TA. 2023-2026
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
	Kegiatan:		Kegiatan:
	- Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah		- Administrasi Umum Perangkat Daerah
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	**Program Pengembangan IklimPenanaman Modal**	2.	**Program Pengembangan IklimPenanaman Modal**
	Kegiatan:		Kegiatan:
	- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi		- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
	- Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal - Fasilitas kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi		
	- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
	- Penyusuna Peta Potensi Investasi Provinsi		
3.	**Program Promosi Penanaman Modal**	3.	-
	Kegiatan:		-
	- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		-
	- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		
4.	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	4.	**Program Pelayanan Penanaman Modal**
	Kegiatan:		Kegiatan:
	- Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		- Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui system Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik - Pemantauan, Analisi, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha berbasis risiko		

	- Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan DaerahProvinsi		- Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan DaerahProvinsi
	- Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui system Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik - Pemantauan, Analisi, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha berbasis risiko		
5.	**Program Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal**	5.	**Program Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal**
	- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
	- Pengawasan Penanaman Modal - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya - Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha		
6.	**Program Pengelolaan Data dan SistemInformasi Penanaman Modal**	6.	**Program Pengelolaan Data dan SistemInformasi Penanaman Modal**
	- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasipada Tingkat Daerah Provinsi		- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasipada Tingkat Daerah Provinsi
	- Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		

Sumber : Data diolah

2.2. Laporan Kemajuan Kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024

Tabel. 2.2

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d TW IV		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Anggaran mendahului	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
				(%)	(Rp)	(%)	Rp	%		
2 18 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.959.392.339,00**	**10.205.403.427**	**75 %**	**10.205.403.427**	**100**	**9.774.569.441,00**	**95,78**		
2 18 01 1,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**99.047.400,00**	**76.201.300**	**100**	**76.201.300**	**100**	**72.276.000,00**	94,85	-	-
2 18 01 1,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91.086.900,00	70.201.300	100	70.201.300	100	66.286.000,00	94,42	-	-
2 18 01 1,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.960.500,00	6.000.000	100	6.000.000	100	5.990.000,00	99,83	-	-
2 18 01 1,02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.316.248.119,00**	**8.687.575.707**	**100**	**8.687.575.707**	**100**	**8.487.758.375,00**	**97,70**		
2 18 01 1,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	8.316.248.119,00	8.687.575.707	100	8.687.575.707	100	8.487.758.375,00	97,70		
2 18 01 1,05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**71.000.000,00**	**11.000.000**	**100**	**11.000.000**	**100**	**10.752.600,00**	**97,75**		
2 18 01 1,05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71.000.000,00	11.000.000	100	11.000.000	100	10.752.600,00	97,75		
2 18 01 1,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**546.288.020,00**	**577.179.520,00**	**100**	**577.179.520,00**	**100**	**524.408.840,00**	**90,86**	-	-

2 18 01 1,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.230.100,00	11.518.700	100	11.518.700	100	10.207.000,00	88,61	-	-
2 18 01 1,06 01 UPTD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.999.600,00	7.906.600	100	7.906.600	100	3.374.000,00	42,67	-	-
2 18 01 1,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.997.100,00	23.830.700	100	23.830.700	100	20.728.100,00	86,98	-	-
2 18 01 1,06 02 UPTD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.999.200,00	10.000.300	100	10.000.300	100	7.730.000,00	77,30	-	-
2 18 01 1,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.992.200,00	12.431.900	100	12.431.900	100	10.979.000,0	88,31	-	-
2 18 01 1,06 03 UPTD	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	15.000.000,00	10.020.500	100	10.020.500	100	10.020.500	100	-	-
2 18 01 1,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.999.100,00	27.344.200	100	27.344.200	100	26.753.600,00	97,84	-	-
2 18 01 1,06 04 UPTD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.997.200,00	3.997.200	100	3.997.200	100	3.601.200,00	90,09	-	-
2 18 01 1,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.999.620,00	54.682.520	100	54.682.520	100	40.653.000,00	78,66	-	-
2 18 01 1,06 05 UPTD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.600,00	19.999.600	100	19.999.600	100	12.660.000,00	63,30	-	-
2 18 01 1,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	24.855.000	100	24.855.000	100	22.495.000,00	90,50	-	-

2 18 01 1,06 06 UPTD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.960.000,00	4.960.000	100	4.960.000	100	4.960.000,00	100	-	-
2 18 01 1,06 07	Penyediaan Bahan/Material	76.632.800,00	76.632.800	100	76.632.800	100	64.568.250,00	84,26	-	-
2 18 01 1,06 07 UPTD	Penyediaan Bahan/Material	14.999.500,00	14.999.500	100	14.999.500	100	12.823.250,00	85,49	-	-
2 18 01 1,06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.500.000,00	57.500.000	100	57.500.000	100	53.391.400,00	92,85	-	-
2 18 01 1,06 08 UPTD	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.500.000,00	21.500.000	100	21.500.000	100	21.500.000,00	84,14	-	-
2 18 01 1,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.000.000,00	148.000.000	100	148.000.000	100	148.000.000,00	100	-	-
2 18 01 1,06 09 UPTD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000,00	50.000.000	100	50.000.000	100	49.964.540,00	99,93	-	-
2 18 01 1,06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	20.482.000,00	0	100	0	0	0,00	0		

2 18 01 1,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**945.231.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**		
2 18 01 1,07.05	Pengadaan Mebel	122.496.800,00	0	0	0	0	0,00	0		
2 18 01 1,07.05 UPTD	Pengadaan Mebel	33.130.200,00	0	0	0	0	0,00	0		
2 18 01 1,07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	675.036.300,00	0	0	0	0	0,00	0		
2 18 01 1,07.06 UPTD	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	114.568.600,00	0	0	0	0	0,00	0		
2 18 01 1,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.189.894.000,00**	**1.085.991.800,00**	**100**	**1.085.991.800,00**	**100**	**999.917.296,00**	**92,07**	-	-
2 18 01 1,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	4.999.800	100	4.999.800	100	4.510.129,00	39,52	-	-
2 18 01 1,08 01 UPTD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.994.000,00	4.992.000	100	4.992.000	100	1.973.000,00	18,74	-	-
2 18 01 1,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.000,00	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	121.790.167,00	69,59	-	-
2 18 01 1,08 02 UPTD	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000,00	31.000.000	100	31.000.000	100	27.744.000,00	89,50	-	-
2 18 01 1,08 04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	700.000.000,00	606.100.000,00	100	606.100.000,00	100	590.000.000,00	95.69	-	-
2 18 01 1,08 04 UPTD	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	263.900.000,00	263.900.000	100	263.900.000	100	263.900.000	100	-	-
2 18 01 1,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**481.330.800,00**	**289.330.800,00**	**100**	**289.330.800,00**	**10**	**156.911.038,00**	**54,23**	-	-

2 18 01 1,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.850.000,00	64.850.000,00	100	64.850.000,00	100	38.229.000,00	58,95	-	-
2 18 01 1,09 01 UPTD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.000.000,00		100		100	0,00	0	-	-
2 18 01 1,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.962.000,00	69.962.000,00	100	69.962.000,00	100	30.429.670,00	43,49	-	-
2 18 01 1,09 02 UPTD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.600.000,00		100		100	50.779.218,00	74,02	-	-
2 18 01 1,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.920.000,00	74.920.000,00	100	74.920.000,00	44	31.048.150,00	41,44	-	-
2 18 01 1,09 06 UPTD	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	10.000.000,00		100		60	6.425.000,00	54,25	-	-
2 18 01 1,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	100.000.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
2 18 01 1,09 09 UPTD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	10.000.000,00		0		0	0,00	0,00	-	-
2 18 01 1,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.998.800,00	998.800,00	0	998.800,00	0	0,00	0,00	-	-
2 18 01 1,09 10 UPTD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00		0		0	0,00	0,00	-	-

2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGANIKLIM PENANAMAN MODAL**	**477.476.216,00**	**325.900.616,00**	**100**	**325.900.616,00**	**256**	**297.146.592,00**	**91,18**		
2 18 02 1,01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan DaerahProvinsi**	**170.484.100,00**	**49.992.500,00**	**100**	**49.992.500,00**	**650**	**47.091.960,00**	**94,20**		-
2 18 02 1,01 01	Penetapan Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas /Insentif dan kemudahan penanaman Modal	45.294.500,00	5.255.800,00	100	5.255.800,00	100	4.585.710,00	87,25	-	-
2 18 02 1,01 02	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	125.189.600,00	44.7363.700,00	100	44.7363.700,00	650	42.506.250,00	95,01	-	-
2 18 02 1,02	**Pembuatan Peta PotensiInvestasi Provinsi**	**306.992.116,00**	**275.908.116,00**	**100**	**275.908.116,00**	**100**	**250.054.632,00**	**90,63**	-	-
2 18 02 1,02 01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	306.992.116,00	275.908.116,00	100	275.908.116,00	100	250.054.632,00	90,63	-	-
2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**266.526.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**		
2 18 03 1,01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan DaerahProvinsi**	**266.526.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	-	-
2 18 03 1,01 01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	214.600.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-	-
2 18 03 1,01 02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	51.926.700	0	0	0	0	0,00	0	-	-

2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**159.140.960,00**	**99.589.960,00**	100	**99.589.960,00**	**178**	**62.385.716,00**	**62,64**		
2 18 04 1,01	**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya LintasDaerah Kabupaten/Kota**	**25.995.700,00**	**0**	0	**0**	**0**	**0,00**	0	-	-
2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	16.000.000,00	0	0	0	0	0,00	0	-	-
2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9.995.700,00	0	0	0	0	0,00	0	-	-
2 18 04 1,02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**133.145.260,00**	**99.589.960,00**	100	**99.589.960,00**	**178,32**	**62.385.716,00**	**62,64**	-	-
2 18 04 1,02 0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	23.980.200,00	23.329.800,00	100	23.329.800,00	178	22.345.030,00	95,78	-	-
2 18 04 1,02 0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	73.199.100,00	63.199.100,00	100	63.199.100,00	178	32.591.936,00	51,572	-	-
2 18 04 1,02 0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	35.965.960,00	13.061.060,00	100	13.061.060,00	178	7.448.750,00	57,03	-	-
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMANMODAL**	**975.999.700,00**	**965.999.700,00**	**100**	**965.999.700,00**	**2002**	**868.058.469,00**	**89,86**		

2 18 05 1,01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan DaerahProvinsi**	**975.999.700,00**	**965.999.700,00**	**100**	**965.999.700,00**	**111**	**868.058.469,00**	**89,86**	-	
2 18 05 1,01 0004	Pengawasan Penanaman Modal	526.000.000,00	516.000.000,00	100	516.000.000,00	177	512.739.119,00	99,37	-	-
2 18 05 1,01 0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100.000.000,00	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	82.558.720,00	82,56	-	-
2 18 05 1,01 0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	349.999.700,00	349.999.700,00	100	349.999.700,00	109	272.760.630910,00	77,93	-	-
2 18 06	**PROGRAM PENGELOLAANDATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMANMODAL**	**25.952.800,00**	**51.930.200,00**	100	**51.930.200,00**	**100**	**50.864.609,00**	**97,95**		
2 18 06 1,01	**Urusan Pengelolaan Data danInformasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**25.952.800,00**	**51.930.200,00**	100	**51.930.200,00**	**100**	**50.864.609,00**	**97,95**	-	-
2 18 06 1,01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan InformasiPerizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25.952.800,00	51.930.200,00	100	51.930.200,00	100	**50.864.609,00**	**97,95**	-	-
		13.554.136.615,00	**12.170.699.603,00**		**12.170.699.603,00**		**11.530.479.535**	**98,98%**		

Sumber : Data diolah

Berikut ini adalah capaian hasil dari masing – masing indikator kegiatan

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini merupakan program untuk kegiatan rutin kantor dengan indikator nilai Sakip PD dan Survey kepuasan pelayanan internal.

Adapun uraian kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yakni :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 99.047.400,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.76.201.300,00,-. turun sebesar Rp 22.846.100,00 atau 23,07%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Realisasi anggaran Triwulan IV sebesar Rp 72.276.000,00,- atau 94,85% dan realisasi fisik sebesar 100%.

untuk mendukung kegiatan ini, telah ditetapkan sub kegiatannya, yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran induk Rp 91.086.900,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp 70.201.300,00,-. turun sebesar Rp20.855.600,00 atau 22,93%. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Renstra PD dan Renja PD. Realisasi anggaran sampai TW IV Rp 66.286.000,- atau 94,42% dan realisasi fisiknya sebesar 100%. *Output* yang diharapkan dari sub kegiatan ini ada 11 dokumen yaitu Renja PD 2025, Renja PD Perubahan 2024, RKA 2025,RKPA 2024, DPA 2024, DPPA 2024 PK 2024, PK Perubahan, Sirup 2024, Sirup Perubahan 2024 dan IKU dalam I Tahun. Sampai TW IV Dokumen yang telah diselesaikan ada 11 yaitu PK 2024, PK Perubahan 2024,IKU, DPA 2024, DPPA 2024 , Sirup 2024 (Sistem Rencana Umum Pengadaan), Sirup Perubahan 2024 dan Renja 2025, RKPA 2024, Renja Perubahan 2024, RKA 2025.
b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp 7.960.500,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp 6.000.000,00,-. turun sebesar Rp1.960.500,00 atau 24,63%. Pada Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah. Realisasi sub kegiatan ini sebesar RP 5.990.000,- atau 99,83% dengan realisasi fisiknya sudah mencapai 100% dari target. Target dari sub kegiatan ini adalah 7 laporan kinerja. Sampai TW IV evaluasi kinerja yg sudah dilaporkan sebanyak 7 laporan yaitu Dalev TW IV 2023, LPPD TA 2023, LKPJ TA 2023, LAKIP Tahun 2023, Dalev TW I 2024,Dalev TW II dan Dalev TW III 2024.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.316.248.119,-,.Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp 8.687.575.707,00,-. naik sebesar Rp 271.327.588,00 atau 3,26%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah jumlah Laporan keuangan PD yang tepat waktu. Laporan Keuangan Tahun 2024 telah selesai disusun. Untuk mendukung kegiatan ini, ditetapkan sub Kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran Rp. 8.316.248.119,-. Sampai dengan TW IV realisasi keuangan sub kegiatan untuk pembayaran gaji dan Tunjangan ASN DPMPTSP ini sebesar Rp.8.487.758.375,- atau 97,70% dan realisasi Fisik sebesar 100%.
3. kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp71.000.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.11.000.000,00 ,-. turun sebesar Rp 60.000.000,00 atau 84,51%. Keluaran kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian .

   untuk mendukung kegiatan ini, sub kegiatan yang di jalankan adalah :
   a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funsi dengan pagu anggaran setelah perubahan RP.11.000.000,-.Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 5 orang. Realisasi keuangan di TW IV sub kegiatan ini sebesar Rp 10.752.600,- atau 97,75%. Dan realisasi fisik 100%.,
4. kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 425.832.920,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp 433.795.820,00,-. naik sebesar Rp7.962.900,00 atau 18,36% Keluaran kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (DPMPTSP). Realisasi kegiatan ini di TW IV sebesar Rp 397.775.350,- atau 91,70%. Dan realisasi fisik 100%.

   untuk mendukung kegiatan ini, sub kegiatan yang di jalankan adalah :
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran RP.49.230.100,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp 11.518.700,00,-. turun sebesar Rp 37.711.400,00 atau 76.60% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia sebanyak 2 paket. Realisasi keuangan di TW IV sub kegiatan ini sebesar Rp 10.207.000,-. Realisasi sub kegiatan ini sebanyak 2 Paket atau 100%.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran RP.29.997.100,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp 23.830.700,-. turun sebesar Rp 6.166.400,00 atau 20,56% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia sebanyak 4 paket. Realisasi sub kegiatan ini sebesar 4 Paket, Realisasi keuangan di TW IV sub kegiatan ini sebesar Rp 20.728.100,00 atau 86,98% dengan realisasi fisiknya sebesar 100%.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran RP.14.992.200,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp 12.431.900,00,-. turun sebesar Rp 2.560.300,00 atau 17,08% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia sebanyak 12 paket. Realisasi kegiatan ini sebesar 12 paket, Realisasi Keuangan sampai TW IV sebesar Rp.10.979.000,00 atau 88,31% dengan realisasi fisiknya 100%.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran Rp.24.999.100,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp 12.431.900,00,-. turun sebesar Rp 27.344.200,00 naik sebesar Rp 2.345.100,00 atau 9,38% Sampai dengan TW IV realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.26.753.600,- atau 97,84%. keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia sebanyak 12 paket . Realisasi sub kegiatan ini sebanyak 12 Paket, dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

f. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 59.999.620,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.51.682.520,00,-. turun sebesar Rp 8.317.100,00 atau 13,86% Realisasi keuangan TW IV sebesar Rp. 40.653.000,- atau 78,66%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia sebanyak 12 Paket. Realisasi sub kegiatan ini sebanyak 12 Paket. Dengan realisasi fisiknya 100%.

g. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 24.855.000,00,-. turun sebesar Rp.5.145.000,00 atau 17,15% Realisasi Keuangan TW IV sebesar Rp.22.495.000,-atau 90,50%. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan perundangan-undangan yang tersedia sebanyak 12 Dokumen. Realisasi sub kegiatan TW IV sebesar 12 dokumen dan realisasi fisiknya sebesar 100%. .

h. Sub Kegiatan Penyediaan bahan/Material, dengan pagu anggaran Rp.76.632.800,-. Realisasi keuangan TW IV sebesar Rp. 64.568.250,00. atau 84,26%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 4 Paket jumlah paket bahan material yang tersedia seperti kertas, tinta dan ATK lainnya. Realisasi sub kegiatan ini sebanyak 4 paket dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

i. Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran Rp.57.500.000,-. Realisasi Keuangan TW IV sebesar Rp. 53.391.400,- atau sebesar 92,85% dan realsiasi fisik sebesar 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 12 laporan dengan realisasi sebanyak 12 laporan atau realisasi fisiknya sebesar 100%. Sub Kegiatan ini adalah penyediaan makan minum rapat dan tamu di DPMPTSP.

j. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran Rp 62.000.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 148.000.000,00,-. naik sebesar Rp.86.000.000,00 atau 138,71%. Realisasi Keuangan TW IV sebesar Rp 148.000.000,00 atau sebesar 100% dan keluaran dari kegiatan ini adalah 12 laporan dengan realisasi sampai TW IV sebanyak 12 laporan atau realisasi fisiknya sebesar 100%. Keluaran sub kegiatan jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

k. Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD, dengan alokasi anggaran Rp 20.482.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00,-. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan Anggaran.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah, dengan pagu anggaran Rp.797.533.100,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan Anggaran.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah, dengan pagu anggaran Rp.890.000.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.786.099.800,00,-. Turun sebesar Rp.103.900.200,00 atau 11,67%. Realisasi keuangan TW IV kegiatan ini sebesar Rp.706.300.296,- atau 89,85%. Realisasi fisiknya 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (DPMPTSP).

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp15.000.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.4.999..800,00,-. Turun sebesar Rp.10.000.200,00 atau 66,67%. Realisasi TW IV keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.510.129,- atau sebesar 90,21% dari pagu anggaran. keluaran dari kegiatan ini adalah 12 laporan dengan realisasi sampai TW IV sebanyak 12 laporan atau realisasi fisiknya sebesar 100% .

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp.175.000.000,-. Realisasi keuangan TW IV sub kegiatan ini sebesar Rp 121.790.167,- atau 69,59% keluaran dari kegiatan ini adalah 12 laporan dengan realisasi sampai TW IV sebanyak 12 laporan dengan realisasi fisik 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah untuk pembayaran listrik, telepon, kawat/faksimili/internet untuk 12 bulan.

c. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum kantor, dengan pagu anggaran Rp.700.000.000.-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.606.100.100,00,-. Turun sebesar Rp.93.900.000,00 atau 134,14%. Realisasi keuangan TW IV sub kegiatan ini sebesar Rp.580.000.000,- atau 95,69% dengan keluaran dari kegiatan ini adalah 12 laporan dengan realisasi sampai TW IV sebanyak 12 laporan realisasi fisik 100%. Selama TW IV sub kegiatan ini telah melakukan belanja pembayaran Tenaga Harian Lepas sebanyak 25 orang untuk 12 bulan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahaan Daerah, dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp.359.730.800,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.210.730.800,00,-. Turun sebesar Rp.149.000.000,00 atau 41,42%. Realisasi keuangan TW IV sebesar Rp.99.706.820,- atau 47,31% dan realisasi fisik 95%. Kegiatan ini ditunjang oleh 4 sub kegiatan yaitu :

   a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran Rp.64.850.000,-. Realisasi keuangan TW IV sebesar Rp.38.229.000,- atau 58,95% dan realisasi fisiknya 100% Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya dengan target 1 unit. Sampai TW IV sub kegiatan ini sudah membelanjakan pengeluaran untuk biaya BBM kendaraan operasional dan servis kendaraan.

b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran Rp 69.962.000,-. Realisasi keuangan TW IV sebesar Rp.30.429.670,- atau 43,49% dan realisasi fisik 100%, Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya dengan target 3 unit dan Jumlah kendaraan yang dipelihara pada TW IV sebanyak 3 unit.

c. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran Rp 74.920.000,-. Realisasi keuangan TW IV sub kegiatan ini Rp.31.048.150 atau 41,44% dan realisasi fisiknya 96%,- Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 91 unit, realisasi sub ini sebanyak 87 unit.

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya, dengan pagu anggaran Rp100.000.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan Anggaran.

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran Rp.49.998.8000-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan Anggaran.

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Program ini berkaitan dengan peningkatan kerjasama mitra kerja dengan investor. Indikator program ini adalah Banyaknya Investor yang menanamkan modal dengan target 23 Investor dengan pagu Rp.477.476.216,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.325.900.616,00,-. Turun sebesar Rp.151.575.600,00 atau 31,74%. Realisasi keuangan TW IV sebesar Rp.297.146.592,- atau 91,18% dan realisasi fisik 256% . Investor yang menanamkan modal sebanyak 64 Investor ditahun 2024. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Pagu anggaran tahun 2024 Rp.170.484.100,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.49.992.500,00,-. Turun sebesar Rp.120.491.600,00 atau 70,68%. Realisasi keuangan TW IV sebesar Rp.47.091.960,- atau 94,20% dan realisasi fisik 650%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas/insentif

Provinsi dengan target 2 Pelaku Usaha terealisasi sebanyak 13 Pelaku Usaha

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

a. Sub kegiatan Penetapan kebijakan Daerah dalam pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan pagu anggaran Rp Rp.45.294.500,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.5.255.800,00,-. Turun sebesar Rp.40.038.700,00 atau 88,37%. Realisasi keuangan TW IV sebesar Rp.4.585.710,- atau 87,25% dan realisasi fisiknya 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan target 1 Dokumen, dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen.

b. Sub kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan pagu anggaran Rp 125.189.600,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.44.736.700,00,-. Turun sebesar Rp.80.452.900,00 atau 64,26%. Realisasi keuangan TW IV sebesar Rp. 42.506.250,- atau 95,01% . Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Kesepakatan Kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah targetnya sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sebanyak 13 Dokumen kesepakartan kemitraan atau sebesar 650%.

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi. Pagu kegiatan ini tahun 2024 adalah Rp.306.992.116,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.275.908.1160,00,-. Turun sebesar Rp.31.084.000,00 atau 10,13%. Realisasi Keuangan TW IV sebesar Rp 42.506.250,- atau 95,01%. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah peta Peluang investasi Provinsi sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi fisik 100%

   Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

3. Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi dengan pagu anggaran Rp.306.992.116,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.275.908.1160,00,-. Turun sebesar Rp.31.084.000,00 atau 10,13%. Realisasi Keuangan TW IV sebesar Rp 42.506.250,- atau 95,01%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen peta Potensi investasi Provinsi sebanyak 1 Dokumen, dengan realisasi fisik 100%

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program ini bertujuan untuk mengundang investor menanamkan modalnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pagu induk program ini adalah

Rp.266.526.700,-. Indikator program ini adalah Jumlah Peluang Penanaman Modal yang dipromosikan dengan target 2 Peluang. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan Anggaran .

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Pagu induk anggaran kegiatan ini Rp.266.526.700,- Keluaran dari kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebanyak 2 Promosi. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan Anggaran

   Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

   a. Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dengan pagu anggaran Rp.214.600.000,-. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil Kegiatan promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi sebanyak 1 dokumen. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan Anggaran

   b. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dengan pagu Rp.51.926.700,-. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Strategi promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi sebanyak 2 dokumen. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan Anggaran

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program ini terkait dengan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP. Keluaran program ini adalah Jumlah Pelaku Usaha yang Terlayani dengan target 950 Pelaku Usaha. Pagu program ini sebesar Rp.159.140.960,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.99.589.960,00,-. Turun sebesar Rp.59.551.000,00 atau 37,42%. dengan target 475 Pelaku Usaha. Realisasi keuangan program ini TW IV adalah Rp.62.385.716,00 atau 62,64% dengan realisasi fisik sebesar sebanyak 847 atau 178,32%.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah

Kabupaten/Kota. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik. Target kegiatan ini 50 Izin dan Non Perizinan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.25.995.700,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan Anggaran.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, dengan pagu anggaran Rp16.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik sebanyak 50 Pelaku Usaha. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan Anggaran.

b. Sub Kegiatan Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Pagu Anggaran Rp.9.995.700,-. Keluaran sub Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas daerah Kabupaen/Kota bagi pelaku usaha dengan target 50 Kegiatan Pelaku Usaha. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan Anggaran.

2. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.133.145.260,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 99.589.960,00,-. Turun sebesar Rp.33.555.300,00 atau 25,20%. Realisasi keuangan TW IV sebesar Rp. 62.385.716,00 atau 62,64%. Sampai TW IV jumlah Izin dan Non Perizinan yang dikeluarkan sebanyak 774 izin (s.d bulan November 2024) atau 163 % dari target

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan pagu anggaran Rp.23.980.200,-. Keluaran

sub kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui system Perizinan Berusaha Berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan target 900 Pelaku Usaha. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 23.329.800,-. Turun sebesar Rp.650.400,00 atau 2,71%. dengan target 475 Pelaku Usaha. Realisasi keuangan TW IV sebesar Rp 22.345.030,- atau 95,78% Sampai TW IV jumlah Izin dan Non Perizinan yang dikeluarkan sebanyak 847 izin atau 178,32% dari target.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan pagu anggaran Rp 73.199.100,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah Tersediannya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan target 925 Izin dan Non Izin. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.63.199.100,-. Turun sebesar Rp.10.000.000,00 atau 13,66%. dengan target 475 Pelaku Usaha Realisasi keuangan TW IV sebesar Rp.32.591.936,- atau 51,57%. Sampai TW IV jumlah Izin dan Non Perizinan yang dikeluarkan sebanyak 847 izin atau 178,32% dari target. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Pagu anggaran Rp.35.965.960,- .Keluaran Sub Evaluasi , dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah Kabupaten/ kota bagi kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha dengan target 925 izin dan Non Izin. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.13.061.060,-. Turun sebesar Rp.22.904.900,00 atau 63,68%. Realisasi keuangan TW IV sebesar Rp 7.448.750, atau 57,03%. Sampai TW IV jumlah Izin dan Non Perizinan yang dikeluarkan sebanyak 847 izin atau 178,32% dari target.

V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Program ini terkait dengan pengawasan perusahaan yang izinnya telah dikeluarkan oleh Provinsi. Keluaran program ini adalah Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, profil dan informasi kegiatan usaha dan pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha .Persentase Peningkatan Perusahan yang Patuh terhadap Perundang-undangan dengan target 1,1%. Pagu Anggaran sebesar Rp 975.999.700,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 965.999.700,-. Turun sebesar Rp.10.000.000,00 atau 1,24%. Realisasi keuangan Program ini pada

TW IV adalah Rp.868.058.469,- atau 89,86% Realisasi fisiknya terealisasi sebesar 22,02 atau 2.002%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Rp 975.999.700,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, profil dan informasi kegiatan usaha dan pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha dengan target sebanyak 306 PU dan KU. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 965.999.700,-. Turun sebesar Rp.10.000.000,00 atau 1,24%. Realisasi keuangan sampai TW IV adalah Rp. 868.058.469,- atau 89,86%. Realisasi target sampai TW IV sebanyak 341 PU dan KU,sehingga realisasi fisiknya 111%,

   Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

   a. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dengan pagu anggaran Rp.526.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, profil dan informasi kegiatan usaha dan pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha dengan target 13 Kegiatan Usaha sampai dengan TW IV sudah terealisasi sebanyak 23 Kegiatan Usaha. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 516.000.000,-. Turun sebesar Rp.10.000.000,00 atau 1,90%. Realisasi keuangan pada TW IV adalah Rp.512.739.119,- atau 99,37 % realisasi fisiknya 177%.

   b. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha *dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* dengan pagu anggaran Rp 100.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan target 18 kegiatan usaha realisasi 18 kegiatan Usaha. Realisasi keuangan pada TW IV adalah Rp 82.558.720,-. atau 82,56% dan fisiknya 100%.

   c. *Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dengan pagu* anggaran Rp.349.999.700,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan target 300 Pelaku Usaha. Realisasi keuangan pada TW IV adalah Rp.272.760.630,- atau 77,93% dan fisiknya 109%.

VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Program berkaitan dengan data informasi perizinan dan non perizinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keluaran dari program ini adalah Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinana yang dikelola Pagu program ini Rp 25.952.800,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 51.930.200,-. naik sebesar Rp.25.977.400,00 atau 100,09%. Realisasi keuangan Program ini pada TW IV adalah Rp 50.864.609,- atau 97,95% dan realisasi fisiknya 100%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi. Pagu kegiatan ini Rp 25.952.800,-. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah data dan informasi perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi sebanyak 1 dokumen. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 51.930.200,-. naik sebesar Rp.25.977.400,00 atau 100,09%. Pada dengan TW IV realisasi keuangan sebesar Rp. 50.864.609,- atau 97,95% dan realisasi fisiknya 100%.

   Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

2. Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan pagu Rp 25.952.800,-. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan sebanyak 12 dokumen. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 51.930.200,-. naik sebesar Rp.25.977.400,00 atau 100,09%. Dan sudah terealisasi sebanyak 12 dokumen. Pada TW IV realisasi keuangan sebesar Rp. 50.864.609,- atau 97,95% dan realisasi fisiknya 100%.

Agar pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Belitung dapat terlayani dengan cepat dan baik maka dibentuklah UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) wilayah Belitung. Untuk mendukung hal tersebut, maka disiapkan anggaran untuk operasional *UPT PPT* Wilayah Belitung.

VII. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Untuk menunjang pelayanan di UPT PPT wilayah Belitung maka dianggarkan Program ini yang merupakan program untuk kegiatan rutin dengan indikator nilai Sakip PD dan Indeks kepuasan pelayanan internal. Pagu anggaran untuk UPT

pada program penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah Rp 689.647.900,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 521.875.700,-. turun sebesar Rp.167.772.200,00 atau 24,33%. Realisasi keuangan pada TW IV sebesar Rp 477.454.708,- atau 91,49% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di UPT PPT wilayah Belitung adalah :

1. kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 120.455.100,-. Keluaran kegiatan ini adalah indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT PPT wilayah Belitung). Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 143.383.700,-. naik sebesar Rp.22.928.600,00 atau 19,03%. Realisasi kegiatan ini di TW IV sebesar Rp.126.633.490,- atau 88,32%. Dan realisasi fisik 100%.

   Untuk mendukung kegiatan ini, sub kegiatan yang di jalankan adalah :

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran Rp.12.999.600,-. Keluaran Sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen Listrik yang Disediakan dengan target 4 Paket. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 7.906.600,-. turun sebesar Rp.5.093.000,00 atau 39,18%. Realisasi keuangan di TW IV sub kegiatan ini sebesar Rp.3.374.000,- , atau 42,67% dan realisasi fisik 100%.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran Rp14.999.200,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 4 Paket. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 10.000.300,-. turun sebesar Rp.4.998.900,00 atau 33,33%. Realisasi keuangan di TW IV sub kegiatan ini sebesar Rp.7.730.000,- atau 77,30% dan realisasi fisik seabnyak 4 Paket atau 100%.

   c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran Rp15.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan dengan target 6 Paket. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 10.020.500,-. turun sebesar Rp.4.979.500,00 atau 33,20%. Realisasi keuangan di TW IV sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.020.500,- atau sebesar 100% dan sudah terealisasi sebanyak 6 paket atau realisasi fisiknya sebesar 100%.

   d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran Rp.3.997.200,-. Pada TW IV realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar

Rp.3.601.200,- atau 90,09%. keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. Dengan target sebanyak 12 Paket serta terealisasi sebanyak 12 Paket atau realisasi fisiknya sebesar 100%.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu angagran sebesar Rp19.999.600,-. Pada TW IV realisasi keuangan sebesar Rp.12.660.000,- atau 63,30%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 12 Paket. Realisasi sebanyak 12 Paket denagan realisasi fisiknya sebesar 100%.

f. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.960.000,-. Pada TW IV realisasi Keuangan sebesar Rp. 4.960.000,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan perundangan-undangan yang tersedia sebanyak 12 Dokumen. Dan realisasi sebanyak 12 Dokumen .

g. Sub Kegiatan Penyediaan bahan/Material, dengan pagu anggaran Rp14.999.500,-. Pada TW IV realisasi keuangan sebesar Rp.12.823.250,- atau 85,49%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah paket bahan /material yang disediakan UPT PPT Wilayah Belitung sebanyak 4 Paket. Sudah terealisasi sebanyak 4 paket dengan realisasi fisiknya sebesar 100%.

h. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran Rp.17.500.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 21.500.000,-. naik sebesar Rp.4.000.000,00 atau 22,86%. Pada dengan TW IV realisasi Keuangan sebesar Rp. 21.500.000,- atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran Sub Kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu di UPT PPT wilayah Belitung sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan. Dalam TW IV telah melakukan belanja untuk makan minum rapat.

i. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran Rp.16.000.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.50.000.000,-. naik sebesar Rp.34.000.000,00 atau 212,50%. Pada TW IV realisasi Keuangan sebesar Rp.49.964.540,- atau sebesar 99,93% dan realisasi fisik sebesar 100%. Keluaran Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 Laporan, sampai denagan TW IV sudah terealisasi sebanyak 12 laporan.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu Rp.147.698.800,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00.

Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan Anggaran. Sub Kegiatan di kegiatan ini adalah :

a. Sub kegiatan Pengadaan Mebel, dengan pagu Anggaran Rp33.130.200. keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 3 paket. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan.
b. Sub kegiatan pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, dengan pagu Rp114.568.600,-. keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan sebanyak 18 Unit. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah, dengan pagu anggaran Rp.299.894.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.299.892.000,-. turun sebesar Rp.2.000,00. Pada TW IV realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.293.617.000,- atau 97,91%. Realisasi fisiknya 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPT wilayah Belitung) sebanyak 3 jenis.

   Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

   a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan pagu anggaran tahun 2024 Rp 9.994.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.299.892.000,-. turun sebesar Rp.2.000,00. Dalam TW IV realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.1.973.000,- atau sebesar 39,52% dari pagu anggaran. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan sebanyak 12 laporan dan sudah terealisasi sebanyak 12 laporan dan realisasi fisik sebesar 100%.
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran tahun 2024 Rp.26.000.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.31.000.000,-. naik sebesar Rp.5.000.000,00 atau 19,23%. Pada TW IV realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp.27.744.00,- atau 89,50% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan dan sampai TW IV sudah terealisasi sebanyak 12 laporan untuk pembayaran listrik, telepon, TV berlangganan UPT PPT Wilayah Belitung untuk TW IV.
   c. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum kantor, dengan pagu anggaran Rp.263.900.000.-. Pada TW IV realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp. 263.900.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Pada TW IV kegiatan ini

telah melakukan belanja pembayaran Tenaga Harian Lepas UPT sebanyak 7 orang untuk TW IV.

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah UPT PPT wilayah Belitung dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp.121.600.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp.78.600.000,-. turun sebesar Rp.43.000.000,00. Atau 35,36%. Realisasi keuangan TW IV sebesar Rp.57.204.218,- atau 72,78% dan realisasi fisiknya 100% Kegiatan ini ditunjang oleh sub kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan, dengan Pagu anggaran Rp 13.000.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan
   b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan, dengan pagu anggaran Rp 68.600.000,-. Pada TW IV realisasi keuangan sebesar Rp 50.779.218,- atau sebesar 74,02% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Sampai TW IV sub kegiatan ini telah membelanjakan pengeluaran untuk biaya BBM kendaraan operasional dan servis kendaraan sebanyak 3 unit .
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran Rp10.000.000,-. Sampai TW IV Realisasi keuangan sebesar Rp.6.425.000,- atau sebesar 64,25% dengan realisasi fisiknya sebesar 100%. Dari 5 unit yang dipelihara realisasi sudah sebanyak 5 unit .
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya, dengan pagu anggaran Rp10.000.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan anggaran.
   e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya, dengan pagu anggaran Rp.20.000.000,-. Dalam Anggaran Perubahan menjadi Rp. 0,00. Disebabkan telah mengalami refocusing anggaran dikarenakan keterbatasan anggaran.

BAB III

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

3.1. Kendala

Secara umum dalam Triwulan IV tidak banyak kendala yang dihadapi. Semua anggaran kegiatan sudah dijadwalkan sesuai dengan rencana kegiatannya. Tetapi dikarenakan terjadi Refocusing Anggaran pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada beberapa kendala yang dihadapi oleh program Pelayanan Penanaman Modal. Salah satunya yaitu tidak tersedianya anggaran pelaksanaan untuk pelaksanaan program Promosi Penanaman Modal.

Kendala lainnya yang ada di DPMPTDP tidak adanya data peluang investasi baru yang siap ditawarkan, dan masih adanya ketidakpatuhan dari Pelaku Usaha dalam melaporkan realisasi investasi mereka di LKPM pada saat sudah mendapatkan izin berusaha serta Sistem penyimpanan database base belum tersedia.

Diharapkan apabila terjadi refocusing adanya keseimbangan dalam pengurangan anggaran. Reforcusing anggaran pada DPMPTSP menjadi kurangnya anggaran untuk kelapangan bersama tim Tekhnis sehingga ada beberapa kegiatan terhambat dan tidak bisa dilaksanakan.

Untuk realisasi investasi data yang disampaikan oleh LKPM merupakan data sampai TW III, Realisasi Investasi sampai dengan TW III sebesar Rp.12.379.089.400.000 dikarena untuk data TW IV belum dirilis oleh BKPM.

Dari UPT PPT Wilayah Belitung menyampaikan permasalahan yaitu harga standar dalam system Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku dimana harga berbeda mengikuti tempat atau daerah masing-masing.

3.2. Tindak Lanjut

Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut yang dilakukan adalah :

- Melakukan koordinasi dengan pengampu kegiatan di DPMPTSP.
- Terus melakukan koordinasi dengan semua pihak dalam melaksanakan
- Mengusulkan penambahan SDM yang memiliki kompetensi dibidang promosi penanaman modal seperti tenaga programer computer, tenaga bahasa inggris, tenaga desain grafis, dan tenaga pengelola website, dll.

- Mengusulkan anggaran Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi,
- Masih perlu diadakannya pengawasan ke pelaku usaha guna membina mereka terkait LKPM dan mengetahui sejauh mana progres perizinan/pun realisasi investasi perusahaan.
- Menyiapkan Sistem penyimpanan database base (server) .

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Evaluasi hasil renja PD dilakukan setiap triwulan, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
2. Realisasi Belanja DPMPTSP termasuk UPT PPT wilayah Belitung sebesar Rp.11.530.479.535,- atau sebesar 94,74%. Untuk izin yang telah dikeluarin adalah sebanyak 847 Izin dan non perizinan atau 178,31% dari target;
3. Dalam rapat evaluasi TW IV Kepala Dinas mengharapkan tiap bidang, Sekretariat dan UPT agar lebih maksimal dalam menjalani kegiatan di tahun selanjutnya.

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
										I		II		III		IV											
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 5 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sasaran Bidang																									
		PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP perangkat Daerah (Nilai) (Nilai)	0,00	52.002.715.912	79,00		79	10.958.392.339		2.800.338.459		2.735.085.800		2.130.261.976				7.465.686.235	0,00%	68,12%	79,00	7.465.686.235		14,36%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Nilai)	0,00		92,59		71												0,00%		69,00					
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal UPTD / CABDIN (Nilai)	0,00		97,80		69												0,00%		69,00					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	36,00	1.702.498.375	0,00	-	16	99.047.400	9	11.317.876	-	19.299.777	4	15.260.158	5	-	5	45.877.811	27,78%	46,32%	0,00	45.877.811	0,00%	5,44%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	22,00	1.616.296.875	0,00	-	11	91.086.900	5	11.317.876	-	16.839.777	2	14.440.158	4	-	11	42.597.811	100,00%	46,77%	11,00	42.597.811	50,00%	2,64%		Tidak Ada
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	14,00	86.202.500	0,00	-	7	7.960.500	4	-	-	2.460.000	2	820.000	1	-	7	3.280.000	100,00%	41,20%	7,00	3.280.000	50,00%	3,80%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		35.891.016.537	0,00	-	75	8.316.246.119	-	2.376.911.733	-	2.409.855.201	-	1.822.454.960	-	-	-	6.609.221.894	0,00%	79,47%	0,00	6.609.221.894	0,00%	18,41%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	60,00	35.891.016.537	0,00	-	60	8.316.246.119	52	2.376.911.733	52	2.409.855.201	52	1.822.454.960	52	-	52	6.609.221.894	86,67%	79,47%	52,00	6.609.221.894	86,67%	18,41%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (Persen)		1.040.000.000	0,00	-	68	71.000.000	-	1.000.000	-	-	-	7.352.600	-	-	-	8.352.600	0,00%	11,76%	0,00	8.352.600	0,00%	0,80%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	110,00	1.040.000.000	0,00	-	5	71.000.000	1	1.000.000	-	-	1	7.352.600	3	-	5	8.352.600	100,00%	11,76%	5,00	8.352.600	4,55%	0,80%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi umum PD (DPMPTSP) (%)		3.169.000.000	0,00	-	68	425.832.920	-	34.102.407	-	113.648.208	-	84.866.400	-	-	-	232.617.015	0,00%	54,62%	0,00	232.617.015	0,00%	18,74%		-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8,00	216.000.000	0,00	-	2	49.230.100	-	-	-	-	1	10.207.000	1	-	2	10.207.000	100,00%	20,73%	2,00	10.207.000	25,00%	4,72%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8,00	170.000.000	0,00	-	4	29.997.100	-	-	1	5.976.700	1	3.977.900	2	-	4	9.954.600	100,00%	33,19%	4,00	9.954.600	50,00%	5,86%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	24,00	130.000.000	0,00	-	12	14.992.200	-	-	5	3.457.000	2	7.522.000	4	-	11	10.979.000	91,67%	73,23%	11,00	10.979.000	45,83%	8,45%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	24,00	105.000.000	0,00	-	12	24.999.100	-	-	6	12.802.600	3	6.404.800	3	-	12	19.207.400	100,00%	76,82%	12,00	19.207.400	50,00%	18,29%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	24,00	330.000.000	0,00	-	12	59.999.620	-	-	6	11.849.600	3	9.434.800	3	-	12	21.284.400	100,00%	35,47%	12,00	21.284.400	50,00%	6,45%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24,00	150.000.000	0,00	-	12	30.000.000	-	-	6	12.705.000	2	9.790.000	4	-	12	22.495.000	100,00%	74,98%	12,00	22.495.000	50,00%	15,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	8,00	390.000.000	0,00	-	4	76.632.800	-	-	2	20.867.050	1	20.971.000	1	-	4	41.838.050	100,00%	54,62%	4,00	41.838.050	50,00%	10,73%		Tidak Ada

		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	24,00	276.000.000	0,00	-	12	57.500.000	-	3	6.569.000	3	14.119.300	3	14.096.900	3	-	12	34.787.200	100,00%	60,50%	12,00	34.787.200	50,00%	14,58%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24,00	1.319.000.000	0,00	-	12	62.000.000	-	3	27.533.407	3	31.870.958	3	2.460.000	3	-	12	61.864.365	100,00%	99,79%	12,00	61.864.365	50,00%	4,69%		Tidak Ada
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2,00	120.000.000	0,00	-	1	20.482.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (DPMPTSP) (67)		2.450.000.000	0,00	-	67	797.533.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Diadakan (Paket)	1,00	350.000.000	0,00	-	4	122.495.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan (Unit)	134,00	2.100.000.000	0,00	-	50	675.036.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DPMPTSP) (3)		4.944.800.000	0,00	-	3	890.000.000	3	172.861.443	3	186.861.514	3	170.552.858	3	-	3	510.295.815	100,00%	57,34%	0,00	510.295.815	0,00%	24,23%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	24,00	114.000.000	0,00	-	12	15.000.000	3	550.000	3	-	3	2.848.981	3	-	12	3.398.981	100,00%	22,66%	12,00	3.398.981	50,00%	2,98%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24,00	825.200.000	0,00	-	12	175.000.000	3	30.231.443	3	27.861.514	3	31.403.877	3	-	12	89.296.834	100,00%	51,09%	12,00	89.296.834	50,00%	10,82%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24,00	4.005.600.000	0,00	-	12	700.000.000	3	142.100.000	3	139.200.000	3	136.300.000	3	-	12	417.600.000	100,00%	59,66%	12,00	417.600.000	50,00%	10,43%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (DPMPTSP) (163)		2.805.400.000	0,00	-	96	359.730.800	-	4.125.000	12	25.421.100	11	29.775.000	68	-	91	59.321.100	94,79%	16,49%	0,00	59.321.100	0,00%	20,47%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00	194.000.000	0,00	-	1	64.850.000	-	-	1	15.400.000	-	13.155.000	-	-	1	28.555.000	100,00%	44,03%	1,00	28.555.000	100,00%	14,72%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5,00	826.400.000	0,00	-	3	69.962.000	1	2.350.000	1	5.003.500	-	6.529.000	1	-	3	13.882.500	100,00%	19,84%	3,00	13.882.500	50,00%	1,68%		Tidak Ada
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	164,00	415.000.000	0,00	-	91	74.920.000	-	1.775.000	10	5.017.600	10	10.091.000	67	-	87	16.883.600	95,60%	22,54%	87,00	16.883.600	53,05%	4,07%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2,00	640.000.000	0,00	-	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	730.000.000	0,00	-	1	49.998.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		81,01%	58,12%						
																			Predikat Kinerja		Tinggi	Sedang						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																											
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersedianya investor yang menanamkan modal (Investor)	105,00	4.700.000.000	53,00	-	25	477.476.215		2.802.000		12.739.710		50.676.850		-	64	66.218.560	256,00%	13,87%	23,00	66.218.560		1,41%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas/insentif investasi (Pelaku Usaha)	4,00	2.800.000.000	0,00	-	3	175.494.100	-	2.802.000	-	12.739.710	-	31.500.250	13	-	-	13	46.641.960	650,00%	27,48%	0,00	46.641.960	0,00%	3,73%		
		Penetapan Kelegalan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2,00	1.700.000.000	0,00	-	1	45.294.500	-	1.086.000	-	3.499.710	-	-	1	-	-	1	4.585.710	100,00%	15,12%	1,00	4.585.710	50,00%	0,27%		Tidak Ada
		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	*Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2,00	1.200.000.000	0,00	-	2	125.189.600	-	1.518.000	-	9.240.000	13	31.500.250	-	-	-	13	42.258.250	100,00%	33,77%	13,00	42.258.250	650,00%	3,52%		Tidak Ada
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta peluang investasi provinsi (Dokumen)	6,00	1.800.000.000	0,00	-	1	306.992.116	-	200.000	-	-	-	19.176.600	1	-	-	1	19.376.600	100,00%	6,31%	0,00	19.376.600	0,00%	1,08%		
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)	2,00	1.800.000.000	0,00	-	1	306.992.116	-	200.000	-	-	-	19.176.600	1	-	-	1	19.376.600	100,00%	6,31%	1,00	19.376.600	50,00%	1,08%		Tidak Ada
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	13,87%						
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
		PROGRAM PRIORI PENANAMAN MODAL	Peluang penanaman modal yang dipromosikan (Peluang)	8,00	3.200.000.000	2,00	-	2	266.526.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2,00	-	-	0,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pemasyarakatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pemasyarakatan Promosi Penanaman Modal (Promosi)	7,00	3.200.000.000	0,00	-	0	266.526.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	7,00	2.800.000.000	0,00	-	1	214.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1,00	600.000.000	0,00	-	2	51.926.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%						
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PELATAMAN PENANAMAN MODAL	Pelaku Usaha yang bertayang (Pelaku Usaha)	3600,00	5.850.000.000	1291,00	-	475	159.140.993	-	-	-	20.510.518	-	30.489.168	-	-	-	847	50.999.686	178,32%	32,05%	950,00	50.999.686	-	5,67%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Penanaman Modal yang Bueng Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan lintas daerah kabupaten/kota yang diterbitkan sesuai SOP (Perizinan dan Non Perizinan)	1950,00	1.950.000.000	0,00	-	0	25.995.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	75,00	1.200.000.000	0,00	-	50	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah (Kegiatan usaha)	75,00	750.000.000	0,00	-	50	9.995.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penanaman Modal yang Bueng Keberlian Perizinan Perusahaan-Perusahaan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perizinan dan non perizinan kewenangan Daerah Provinsi yang diterbitkan sesuai SOP (Perizinan dan Non Perizinan)	1825,00	3.900.000.000	0,00	-	475	133.145.293	201	-	133	20.510.518	195	30.489.168	316	-	-	847	50.999.686	178,32%	38,32%	0,00	50.999.686	0,00%	4,37%		

		Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	*Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	900,00	750.000.000	0,00	-	475	23.980.200	201	-	133	618.000	195	15.691.000	318	-	847	16.309.000	100,00%	68,01%	847,00	16.309.000	94,11%	2,17%		Tidak Ada
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	925,00	1.800.000.000	0,00	-	475	73.199.100	201	-	133	12.443.766	365	14.798.168	318	-	1.017	27.241.935	100,00%	37,72%	1017,00	27.241.935	109,95%	1,51%		Tidak Ada
		Pemantauan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	*Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	925,00	1.350.000.000	0,00	-	4756	35.986.993	201	-	133	7.448.750	365	-	318	-	1.017	7.448.750	21,37%	20,71%	1017,00	7.448.750	109,95%	0,55%		Tidak Ada
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	65,90%	32,05%						
																			Predikat Kinerja	Sedang	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pemantauan Peningkatan Penanaman Yang Patuh Terhadap Perundang-Undangan (Persen)	0,00	3.025.000.000	6,94	-	1,1	975.999.700		74.339.800		155.113.810		363.915.318		-	22	593.368.928	2001,82%	60,80%	1,00	593.368.928		19,62%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Pengembalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan Usaha yang telah dilakukan pemantauan, pencatatan dan pengawasan (Pelaku Usaha/Kegiatan Usaha)	250,00	3.025.000.000	0,00	-	300	975.999.700	-	74.339.800	41	155.113.810	200	363.915.318	100	-	341	593.368.928	111,44%	60,80%	0,00	593.368.928	0,00%	53,28%		
		Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan , serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan usaha)	35,00	1.500.000.000	0,00	-	13	526.000.000	6	39.300.800	17	107.178.870	-	229.308.408	-	-	23	375.787.878	100,00%	71,44%	23,00	375.787.878	65,71%	25,05%		Tidak Ada
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	*Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan usaha)	15,00	445.000.000	0,00	-	18	100.000.000	18	29.239.200	-	31.414.940	-	-	-	-	18	60.654.140	100,00%	60,65%	18,00	60.654.140	120,00%	13,63%		Tidak Ada
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	80,00	1.080.000.000	0,00	-	275	349.999.700	-	5.800.000	-	16.520.000	200	134.606.910	100	-	300	156.926.910	100,00%	44,84%	300,00	156.926.910	375,00%	14,53%		Tidak Ada
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	50,82%						
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah						
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang dikelola (Dokumen)	4,00	600.000.000	1,00	-	1	25.952.800		2.535.000		9.659.054		-		-	1	12.194.054	100,00%	46,98%	1,00	12.194.054		2,03%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

		[illegible]	Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi (Dokumen)	2,00	600.000.000	0,00	-	1	25.952.800	-	2.535.000	-	9.859.854	-	-	1	-	1	12.194.654	100,00%	46,99%	0,00	12.194.654	0,00%	2,37%		
		Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Tersedia, Diisi dan Dimanfaatkan (Dokumen)	12,00	600.000.000	0,00	-	12	25.952.800	3	2.535.000	3	9.859.854	3	-	3	-	12	12.194.654	100,00%	46,99%	12,00	12.194.654	100,00%	2,37%		Tidak Ada
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	46,99%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
									12.864.488.715	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										81,33%	63,65%						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Tinggi	Rendah						

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

(Tindak lanjut yang diperbukan dalam triwulan berikutnya*)

(Tindak lanjut yang diperbukan dalam RKPD berikutnya**)

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV

UPTD Pelayanan Perizinan Terpadu Wilayah Belitung

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Semua Bidang																								
	IPM	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**							521.875.700		76.825.214		94.365.068		122.676.377		194.397.531		477.454.206		91,49%		477.454.206		0,00%	UPTD Pelayanan Perizinan Terpadu Wilayah Belitung
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi umum PD (UPT PPT Wilayah Belitung) (65)			0,00		65	143.383.700	-	3.235.000	-	15.564.271	-	43.778.730	-	64.055.489	-	126.633.490	0,00%	88,32%	0,00	126.633.490	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			0,00		4	7.906.600	-	-	-	-	-	-	4	3.374.000	4	3.374.000	100,00%	42,67%	4,00	3.374.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			0,00		4	10.000.300	-	-	-	-	-	-	4	7.730.000	4	7.730.000	100,00%	77,30%	4,00	7.730.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0,00		6	10.020.500	-	-	-	-	3	7.389.700	3	2.630.800	6	10.020.500	100,00%	100,00%	6,00	10.020.500	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			0,00		12	3.997.200	3	-	3	-	3	3.334.900	3	266.300	12	3.601.200	100,00%	90,09%	12,00	3.601.200	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			0,00	-	12	19.999.800	-	-	1	1.650.000	4	8.510.000	7	4.500.000	12	12.660.000	100,00%	63,30%	12,00	12.660.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)			0,00		12	4.960.000	2	760.000	4	1.260.000	2	1.260.000	4	1.680.000	12	4.960.000	100,00%	100,00%	12,00	4.960.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			0,00		4	14.999.500	-	-	2	3.229.100	1	9.195.650	1	398.500	4	12.823.250	100,00%	85,49%	4,00	12.823.250	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			0,00		12	21.500.000	3	2.475.000	3	3.000.000	3	9.250.000	3	6.775.000	12	21.500.000	100,00%	100,00%	12,00	21.500.000	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			0,00		12	50.000.000	3	-	3	6.425.171	3	6.838.480	3	36.700.889	12	49.964.540	100,00%	99,93%	12,00	49.964.540	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Barang BMD Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan (UPT PPT Wilayah Belitung) (21)			0,00		21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)			0,00		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0,00		18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPT Wilayah Belitung) (3)			0,00		3	299.892.000	-	67.039.500	-	66.937.700	-	67.283.500	-	92.355.800	-	293.616.500	0,00%	97,91%	0,00	293.616.500	0,00%	0,00%	

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			-	0,00		-	12	4.992.000	3	406.000	3	1.086.000	3	387.500	3	199.000	12	1.972.500	100,00%	39,51%	12,00	1.972.500	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibiayai (Laporan)			-	0,00		-	12	31.000.000	3	5.734.500	3	4.957.700	3	5.996.000	3	11.055.800	12	27.744.000	100,00%	89,50%	12,00	27.744.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibiayai (Laporan)			-	0,00		-	12	263.900.000	3	60.900.000	3	60.900.000	3	60.900.000	3	81.200.000	12	263.900.000	100,00%	100,00%	12,00	263.900.000	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (UPT PPT Wilayah Belitung) (50)			-	0,00		-	50	78.600.000	-	5.750.714	-	11.853.115	-	11.614.147	-	27.986.242	-	57.204.218	0,00%	72,78%	0,00	57.204.218	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			-	0,00		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			-	0,00		-	2	68.600.000	2	5.750.714	2	10.113.115	2	9.634.147	2	25.281.242	2	50.779.218	100,00%	74,02%	2,00	50.779.218	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			-	0,00		-	5	10.000.000	-	-	2	1.740.000	1	1.980.000	2	2.705.000	5	6.425.000	100,00%	64,25%	5,00	6.425.000	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			-	0,00		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			-	0,00		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
																					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	91,49%					
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
										521.875.700	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											100,00%	91,49%					
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah